

**PEMBANGUNAN DAN KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT DESA
(Studi Etnografi Implementasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Padi, Jagung, dan Kedelai di Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur)**

Hamyana, ✉Ugik Romadi
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

Received: 04 November 2016; Accepted: 23 Oktober 2017; Published: 31 Oktober 2017

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.1959>.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan yaitu: mendiskripsikan Implementasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) di Kab. Bondowoso yang dimaknai oleh masyarakat secara umum; mendiskripsikan dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari program UPSUS PAJALE yang dirasakan oleh masyarakat; mendiskripsikan apakah aktivitas program UPSUS PAJALE telah mendorong terjadinya konflik sosial dikalangan masyarakat di Bondowoso. Untuk mewujudkan tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan etnografi, yang dikemas dalam bingkai penelitian kualitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Teknik Pengumpulan data mengkombinasikan studi dokumen dan penelitian lapangan (field study) melalui wawancara mendalam, observasi, dan pengamatan berperanserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UPSUS Pajale memberikan gambaran bahwa pada kalangan elit, telah memberikan dampak yang cukup baik dan respon yang positif terhadap implementasi program UPSUS, namun belum menyentuh masyarakat marginal dan masyarakat powerless ditingkat struktur terbawah.

Kata Kunci : UPSUS Pajale, Konflik Sosial.

**DEVELOPMENT AND SOCIAL CONFLICT IN THE VILLAGE COMMUNITY
(Ethnographic Study of Implementation of Special Effort Program for Increasing Rice,
Corn, and Soybean Production in Bondowoso-East Java**

ABSTRACT

This research aims to answer the question raised is: describing the Program Implementation Specialty Effort Increasing Production of Rice, Corn and Soybeans (UPSUS PAJALE) in Kabupaten Bondowoso is understood by the general public; describe the impact and the benefits arising from program UPSUS PAJALE perceived by the public; describe whether UPSUS PAJALE program activities have lead to social conflicts among people in Bondowoso. To realize the goal of the research, the research method used is an ethnographic approach, which is encapsulated in frames of qualitative research. Location research is purposive in Kabupaten in East Java. Data collection technique combines the study of documents and field study through interviews, observation, and observation participate. The results showed that the implementation of UPSUS Pajale illustrates that the elite, has impacted quite good and positive response to the implementation of the program UPSUS, but has not touched the marginalized people and communities powerless level structure of the lowest.

Keywords: UPSUS Pajale, Social Conflict.

PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menetapkan sebuah program pembangunan yang dikemas dalam upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kegiatan pendukung lainnya, antara lain: pengembangan jaringan irigasi, optimasi lahan, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai), Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT Jagung), penyediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian) dan pengawalan/ pendampingan. Program pembangunan pertanian tersebut diatas sangat menarik untuk dicermati terkait dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program tersebut, bagaimana pula masyarakat memaknai aktivitas dan implementasi program tersebut, apakah masyarakat (petani) marginal sudah terbebaskan dari berbagai tekanan struktural dan kultural yang selama ini membelenggu mereka atau sebaliknya masyarakat marginal semakin tidak berdaya dan terpisah dari aktivitas pembangunan yang dicanangkan, apakah aktifitas pembangunan yang dilaksanakan telah menetralsisir konflik horizontal maupun vertikal yang selama ini terjadi pada komunitas masyarakat atau malah sebaliknya, aktivitas pembangunan telah memperlebar jarak antara golongan satu dengan golongan yang lain.

Lokus kajian yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Kabupaten Bondowoso, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1). Kabupaten bondowoso merupakan kabupaten yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, (2). Distribusi program UPSUS di Kabupaten bondowoso tersebar merata di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, (3). karakteristik masyarakat bondowoso (sosiografi dan jaringan komunikasi) yang sebagian besar adalah ras Madura, menjadi daya tarik tersendiri

untuk dikaji, (4). Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa program upsus di Kabupaten Bondowoso pada satu sisi memang telah memberikan dampak yang cukup besar, tapi pada sisi lain telah menimbulkan konflik kepentingan antara golongan superior dengan golongan imperior.

Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan yaitu: (1) Mendiskripsikan Implementasi Program UPSUS Pajale di Kab. Bondowoso yang dimaknai oleh masyarakat secara umum, (2) Mendiskripsikan dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari program Upsus Pajale yang dirasakan oleh masyarakat, (3) Mendiskripsikan apakah aktivitas program Upsus Pajale telah mendorong terjadinya konflik sosial dikalangan masyarakat di Bondowoso.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, karena prosedur analisis penelitiannya dirancang non-matematis. Selain hal tersebut, penelitian ini bertujuan ingin mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena sosial yang hanya sedikit diketahui. Peneliti tak hendak menghitung angka-angka berapa jumlah masyarakat yang menerima bantuan program UPSUS, akan tetapi peneliti mencoba mengali informasi sedalam-dalamnya tentang perjalanan implementasi Program UPSUS Swasembada Pajale. Keunggulan yang diharapkan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah dapat memberikan rincian secara kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif (Strauss & Corbin, 2003).

Secara spesifik, penelitian ini dirancang dengan kerangka pemikiran etnometodologi. Yang ingin dicapai dari pemikiran etnometodologi ini adalah peneliti ingin memahami pengetahuan dan pemikiran subyek, apa yang dilakukan subyek, dan bagaimana perasaan dan sikap subyek (Bogdan, R. C., & Biklen, 1982). Sudut pandangnya lebih ditekankan secara emik

(*emic view*) dan bukan secara etik (*etic view*). Namun demikian pandangan etik tetap dimanfaatkan sebagai data pelengkap yang tidak dapat diperoleh dari pandangan emik.

Konsep-konsep penting pemahaman masyarakat tentang pengetahuan, sikap dan tindakan seperti halnya pada kasus dalam implementasi Program UPSUS Pajale, sangat tepat dijadikan sebagai fokus kajian dalam penelitian kualitatif yang menggunakan analisis konflik sebagaimana pula yang digunakan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi kajian yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Kabupaten Bondowoso, dengan pertimbangan sebagai berikut: a). Kabupaten bondowoso merupakan kabupaten yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian; b). Distribusi program UPSUS di Kabupaten bondowoso tersebar merata di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso; c). karakteristik masyarakat bondowoso (sosiografi dan jaringan komunikasi) yang sebagian besar adalah ras Madura, menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji.

Penentuan Informan

Informan dipilih dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini informan ditujukan pada subyek-subyek penelitian yang berhubungan / bersentuhan secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan Program UPSUS Pajale.

Secara spesifik, subyek penelitian ini meliputi perangkat Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, Perangkat Desa, tokoh masyarakat (tokoh informal), kelompok tani dan gabungan kelompok tani, kelompok perempuan, generasi muda dan masyarakat awam. Jumlah masing-masing subyek disesuaikan dengan kebutuhan informasi. Adapun cara pemilihan informan untuk masing-masing kelompok tersebut dengan teknik sampling bola salju (*snowball sampling*). Teknik snowball sampling lazim digunakan sebagai dasar pemilihan subyek pada penelitian kualitatif (Moleong,

1999). Snowball sampling adalah teknik atau cara pengambilam sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pertimbangan dimaksud adalah karena minimnya pengetahuan masyarakat setempat tentang program UPSUS Pajale, sedikitnya jumlah masyarakat yang bersentuhan dengan program UPSUS Pajale dan jumlah masyarakatnya yang relatif banyak. Sampel yang terpilih dirasa cukup apabila jawaban yang diberikan oleh subyek relatif sama dengan subyek lainnya dalam satu kelompok sasaran (Findiastuti, Wignjosobroto, & Dewi, n.d.).

Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya data untuk penelitian kualitatif ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian atau dari dokumentasi yang ada dan yang berhubungan dengan obyek penelitian (Glaser & Strauss, 1985). Cara memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Untuk mendapatkan kedua jenis data tersebut, ada beberapa cara yang akan digunakan :

a. Observasi

Observasi dimaksud dapat bersifat observasi partisipan terbatas, dimana peneliti akan berupaya menjadi bagian dari masyarakat setempat tetapi peneliti bukan merupakan unsur penting yang berhubungan dengan pelaksanaan program UPSUS Pajale. Dengan teknik ini, maka diharapkan akan dapat diperoleh bagaimana pengetahuan, aktivitas dan pemahaman masyarakat terhadap program UPSUS Pajale yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan hasil observasi yang maksimal, peneliti akan memperhatikan dengan seksama perilaku-perilaku subyek dalam kaitannya dengan implementasi program UPSUS Pajale.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan meng-

gunakan panduan berupa pedoman wawancara. Wawancara bersifat terbuka dengan maksud agar diperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang program UPSUS Pajale dan hal ini diharapkan dapat mendorong subyek penelitian untuk berbicara pada bidang yang menjadi perhatiannya. Pedoman wawancara dibedakan untuk masing-masing subyek sesuai dengan struktur sosial yang melekat pada kehidupan sehari-harinya.

c. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat berupa monografi desa, dokumen-dokumen administrasi, foto-foto kegiatan dan sejenisnya. Jenis data yang akan dimanfaatkan adalah data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian.

d. Media elektronik

Media elektronik digunakan untuk keperluan memperoleh rekaman peristiwa-peristiwa secara visual (foto atau film) ataupun secara audio (rekaman) bila mana memungkinkan. Data yang dicari adalah data yang sesuai dengan obyek penelitian dan situasi keadaan obyek penelitian yang dapat memberikan informasi berguna.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya mengarah pada hubungan sebab akibat saja, akan tetapi dicoba untuk berpikir secara utuh. Dalam pendekatan ini yang terpenting bukan sebab dan akibatnya, akan tetapi proses dan dinamika masyarakat tentang apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Dalam penelitian sosial pendekatan secara utuh atau holistik sangat diperlukan terlebih-lebih bila sifat dari penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Adapun data yang dianalisis peneliti adalah data yang diperoleh secara primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam (*depth interview*). Hasil wawancara mendalam sangat penting dalam penelitian yang menggunakan pendekatan etnometodologi --seba-

gaimana pada penelitian ini-- untuk memahami secara mendetail struktur dasar dari interaksi percakapan.

Selanjutnya data primer tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis hubungan suasana (*contextual analysis*) dengan tujuan untuk menilai karakteristik informan dengan konteks sosialnya dan analisis pasangan (*pair analysis*) yang bermanfaat untuk meng-cross check informasi yang diterima dari satu informan dengan informan lain (Ritzer & Alimandan, 1985). Kedua model analisis tersebut menjadi sangat penting untuk menutupi kelemahan-kelemahan metode wawancara dengan teknik snowball sampling. Sebagai contoh informasi tentang anggapan menurut persepsi pengurus kelompok tani, bahwa program UPSUS Pajale berjalan lancar dan masyarakat antusias menyambutnya dapat dilakukan dengan cross check dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima program. Uji silang informasi ini penting mengingat terkadang pada situasi tertentu subyek akan memberikan informasi yang lebih mengedepankan dugaan subyek tentang apa yang diinginkan dari peneliti. Untuk mempertajam analisis, data yang telah diyakini kebenarannya diinterpretasikan dengan cara dipadukan dengan teori-teori yang telah ditawarkan. Sedangkan data sekunder, seperti halnya pada data tentang monografi desa, data hasil penelitian terdahulu, data dokumen-dokumen administrasi dan foto-foto kegiatan dimanfaatkan sebagai bukti penguat informasi dari data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Pelaksanaan Kegiatan Upsus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso bahwa Dinas Pertanian telah menjalankan program UPSUS ini dengan menyalurkan semua bantuan ke 300 kelompok tani, dari 2986 kelompok tani di Bondowoso. Berawal dari informasi ini, peneliti mencoba menelusuri fakta lapang terkait alur pelaksanaan keg-

iatan UPSUS yang sedang dan telah dilaksanakan. Penelusuran fakta ini tentu saja bukan dalam rangka mencari kesalahan dan kelemahan yang terjadi, melainkan dalam rangka mengungkap segala fakta tersebut yang barangkali bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk pengembangan kegiatan dimasa yang akan datang. Kegiatan penelusuran alur kegiatan UPSUS Pajale di Kab. Bondowoso diawali dengan menghimpun informasi dari Dinas Pertanian Kab. Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dan instansi terkait lainnya. Berawal dari informasi tersebut kemudian dikembangkan di tingkat lapangan pada level pelaksana dan sasaran kegiatan yang dalam hal ini adalah kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Ada beberapa hal yang berhasil dihimpun terkait informasi alur kegiatan UPSUS Pajale di Kabupaten bondowoso tahun 2015 yang secara umum meliputi : *tahapan kegiatan pra pelaksanaan, tahapan kegiatan pelaksanaan, dan tahapan kegiatan pengakhiran (supervisi, monitoring dan evaluasi).*

Temuan Data pada Tahap Pra Pelaksanaan Kegiatan

Gema Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung, kedelai (Pajale) dalam dua tahun terakhir ini memang sangat luar biasa. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari jajaran TNI, Bulog, BPS, Dinas Pertanian, LSM dan mahasiswa memberi warna tersendiri dalam ritme perjalanan program kegiatan UPSUS ini. Untuk mengurai fakta yang terjadi sedari awal perjalanan kegiatan UPSUS ini, peneliti mencoba mundur selangkah kebelakang, dalam rangka meninjau ulang bagaimana awal mula kegiatan UPSUS ini dilaksanakan.

Di Kabupaten Bondowoso, pada tahun 2015 telah menggelontorkan program UPSUS yang terdistribusi pada 300 kelompok tani/ gabungan kelompok tani yang tersebar di 22 kecamatan. Penerima bantuan program UPSUS yang berjumlah 300 ini dihasilkan berdasarkan proses seleksi administrasi dari total kelompok tani di kabupaten bondowoso yang jumlahnya

mencapai 2986 kelompok. Proses seleksi administrasi diawali melalui penjurangan Calon Petani dan Calon Lokasi penerima bantuan upsus yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten Bondowoso. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh pedum UPSUS Pajale yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, maka dihasilkan 300 kelompok yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan program UPSUS Pajale. Setelah usulan calon petani dan calon lokasi diusulkan oleh dinas pertanian kab. Bondowoso, langkah selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di Jakarta. Hasil verifikasi calon petani dan calon lokasi ditetapkan sebagai penerima bantuan UPSUS Pajale oleh Kementerian Pertanian.

Temuan Data pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung, kedelai di Kabupaten bondowoso terbagi pada dua tahap, dimana tahap satu meliputi kegiatan Refocusing, yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai april 2015. Sedangkan tahap dua disebut APBNP yang dimulai realisasinya pada bulan Mei sampai Desember 2015. Ada beberapa kegiatan yang dijalankan pada dua tahap pelaksanaan UPSUS Pajale di Kab. Bondowoso antara lain adalah : bantuan Alsintan (pompa air, handtraktor, traktor R4, transplanter, combine, alat tanam Jarwo, dan mini combine), bantuan pupuk dan benih, pelatihan dan pendampingan, serta advokasi kelembagaan.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani melalui program UPSUS pajale, pada satu sisi memang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh petani. Misalnya dengan adanya bantuan pompa air, kebutuhan petani akan sumberdaya air bisa terpenuhi walaupun tidak sepenuhnya merata. Indeks pertanaman pun meningkat dari semula IP 1 menjadi IP 2 bahkan ada yang mampu mencapai IP 3. Kondisi ini tentu merupakan sebuah hal yang bagus untuk perkem-

bangun pembangunan pertanian. Sama halnya dengan manfaat bantuan pompa air, kehadiran hand traktor pun dirasakan manfaatnya oleh sebagian penerima bantuan. Disamping bisa menekan biaya untuk tenaga kerja, waktu percepatan tanam pun bisa dipercepat. Begitu juga dengan alat tanam jarwo, dirasakan sangat bermanfaat untuk sebagian penerima bantuan. Namun demikian, ada beberapa hal yang kami temukan berdasarkan fakta di lapangan terkait kegiatan UPSUS Pajale di Kab. Bondowoso. Fakta ini tentu saja tidak dilandasi dengan niat untuk mencari-cari kesalahan atau kelemahan pihak manapun, akan tetapi murni dilandasi oleh keinginan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam implementasi kegiatan dimasa yang akan datang. Beberapa fakta yang berhasil kami himpun terkait sisi lain dari penyelenggaraan UPSUS Pajale di Kab. Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan Dominasi elit dalam pemanfaatan bantuan khususnya alsintan. Belum terbentuknya sistem yang baik pada saat pemanfaatan bantuan pada tingkat petani atau anggota kelompoktani, menyebabkan distribusi dan alokasi pemanfaatan bantuan seperti traktor, combine, pompa air, dll belum tersebar merata. Pada kondisi seperti ini, para elit kelompok memiliki posisi yang sangat strategis dalam memanfaatkan bantuan tersebut. Pada beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa para elit kelompok adalah yang paling dominan dalam memanfaatkan fasilitas bantuan yang diberikan. Hal ini tentu saja akan menyebabkan anggota yang lain menjadi terbatas aksesnya dalam memanfaatkan fasilitas bantuan yang seharusnya mereka terima. Dengan tidak adanya mekanisme atau sistem yang jelas dalam memanfaatkan fasilitas bantuan yang diberikan sudah menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik kepentingan antar pihak yang terlibat. Dan ketika konflik kepentingan ini terjadi, sudah bisa dipastikan bahwa yang memiliki
- kekuatan atau power yang lebih besar, akan men-subordinasi pihak-pihak yang lemah atau dengan kata lain, akan terjadi dominasi oleh para elit terhadap kaum imperior dalam memanfaatkan fasilitas bantuan yang diberikan.
2. Ada beberapa alsintan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan karakteristik tofografi wilayah, Kontur atau tofografi yang berbukit pada beberapa lokasi sasaran penerima bantuan alsintan, khususnya traktor memang menjadi masalah tersendiri yang harus menjadi perhatian dalam fasilitasi pemberian bantuan pada waktu yang akan datang. Sebagai contoh misalnya pada daerah tertentu yang konturnya lereng dengan sudut kemiringan hampir 45 derajat dan dengan petak persawahan yang terasing serta cenderung sempit, kemudian pada daerah tersebut diberikan fasilitasi bantuan traktor R4, hal ini tentu tidak tepat sasaran. Kondisi ini nyata terjadi pada sebuah wilayah yang menjadi sasaran penerima bantuan program UPSUS di kab. Bondowoso. Pada akhirnya bantuan tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Padahal jika ditinjau dari nilai ekonominya, alsintan tersebut sangat mahal. Ada beberapa fakta yang berhasil dihimpun terkait mengapa ketidak sesuaian spesifikasi alsintan dengan karakteristik topografi ini bisa terjadi. Informasi yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa proses penentuan CPCL yang kurang optimal dan abai terhadap aspek topografi dan kebutuhan sasaran menjadi titik awal permasalahan ini muncul. Masalah ini diperparah dengan kurang fahaman masyarakat terhadap spesifikasi sarana produksi terutama alsintan yang mereka akan terima, yang pada akhirnya mereka hanya menerima saja bantuan yang diberikan pemerintah, tanpa disertai pengetahuan akan manfaat barang tersebut serta keterampilan dalam mengoperasionalsikannya.
3. Keterlambatan distribusi saprodi seperti

bantuan benih, pupuk, alat tanam jarwo, Masalah lainnya yang bisa dihimpun di lapangan terkait pelaksanaan program UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di Kab. Bondowoso adalah keterlambatan distribusi bantuan benih, pupuk dan alat tanam jarwo. Keterlambatan ini disebabkan oleh proses realisasi anggaran dan proses tender yang dilakukan antara pemerintah dalam hal ini dinas pertanian dengan pihak ketiga pemenang tender. Sementara pada aspek realitas petani dihadapkan dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak mungkin harus menunggu dalam ketidakpastian realisasi bantuan. Pada akhirnya petani tidak mau ambil resiko, dan mereka memanfaatkan sumber benih yang mereka miliki. Dan ketika bantuan benih tiba di lokasi, sudah terlambat dan tentu tidak termanfaatkan oleh petani. Kondisi ini memang tidak terjadi pada semua lokasi, hanya sebagian kecil saja yang mengalami masalah tersebut. Namun demikian bukan berarti masalah ini tidak perlu mendapat perhatian yang serius. Bahkan berdasarkan catatan peneliti, kondisi ini hampir terus terjadi pada setiap tahun dan setiap program yang digulirkan oleh pemerintah, walaupun tidak bisa digeneralisasi di semua wilayah.

Distribusi pupuk, dan alat tanam jarwo juga mengalami hal yang sama dengan distribusi benih yaitu mengalami keterlambatan. Hal ini sangat disesalkan oleh para petani mengingat mereka sudah terlanjur menggantungkan harapan pada bantuan tersebut, terutama bantuan pupuk. Penyebabnya relatif sama dengan pengadaan benih, yakni persoalan tender dan distribusi oleh pihak ketiga yang menjadi pemenang tender.

4. Sinkronisasi peran antara dinas pertanian, aparat TNI dan Mahasiswa belum optimal. Keterlibatan berbagai pihak seperti TNI, Penyuluh, Mahasiswa dan LSM dalam pelaksanaan program UPSUS peningkatan produksi padi,

jagung dan kedelai pada satu sisi diharapkan dapat membantu mensukseskan program tersebut. Kesuksesan dimaksud tentu saja bisa diraih jika kordinasi terkait peran dan fungsi masing-masing unsur tersusun secara sistematis, dilaksanakan secara terkoordinasi, yang pada akhirnya terjalin sebuah pola komunikasi yang padu dan berkesinambungan. Namun demikian, implementasinya tidak semudah apa yang dibicarakan. Tugas dan fungsi yang tumpang tindih, tidak terkoordinasi dengan baik, salah persepsi antar pelaksana, masih menjadi problema ditingkat lapangan. Dari semua unsur yang terlibat terkadang terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan tugas pendampingan yang dijalankan pada tingkat oprasionalisasi dilapangan. Walaupun pada akhirnya perbaikan sinkronisasi lintas unsur yang terlibat bisa secara perlahan diperbaiki, namun tetap saja hal ini tidak bisa secara spontan dan dalam waktu yang singkat. Perlu komitmen dan konsistensi dari semua unsur dalam menjalankan program sesuai dengan pedum yang telah ditetapkan.

Temuan Data pada Tahap Pengakhiran Kegiatan

Tahapan kegiatan berikutnya setelah proses persiapan dan pelaksanaan adalah proses pengakhiran kegiatan. Pada tahap ini ada tiga sub kegiatan, yakni pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dilaksanakan atau tindak lanjut yang diperlukan. Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara periodik disetiap tingkatan (mulai dari tingkat kecamatan/BPP, Kab/Kota, Provinsi, Pusat).

Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil pemantauan langsung lapangan, laporan,

dan informasi lainnya. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah. Pelaksanaan Evaluasi dilaksanakan secara berkala diberbagai tingkatan (mulai dari tingkat kecamatan/BPP, Kab/Kota, Provinsi, Pusat). Sementara kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan). Laporan disampaikan secara berjenjang dari Kecamatan/BPP ke Kabupaten/Kota, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan tembusan ke Pusat, dari Provinsi ke Pusat.

Beberapa temuan data pada implementasi kegiatan pengakhiran program UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Bondowoso adalah sbb:

1. Instrumen Monitoring belum operasional dan realistik Keberhasilan proses evaluasi sebuah program sangat bergantung pada beberapa hal diantaranya adalah instrumen evaluasi atau alat ukur yang digunakan dalam proses evaluasi tersebut. Pada beberapa kasus, terkadang hasil pengukuran menjadi tidak tepat dan akurat dikarenakan alat ukurnya atau instrumennya yang tidak tepat. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah dalam rangka menggali informasi terkait semua potensi dan masalah yang ditemui. Jika data hasil evaluasi salah, maka dimungkinkan tindakan solusi penyelesaian masalahnya juga akan keliru. Salah satu point penting dalam menyusun instrumen evaluasi terletak pada penetapan indikator dan variabel-variabel serta parameter keberhasilan program yang sudah ditetapkan. Diperlukan refleksi dan analisis yang mendalam agar kesesuaian antara fakta-fakta lapangan bisa terakomodasi dalam instrumen yang akan disusun. Pada konteks program UPSUS peningkatan produksi padi jagung dan kedelai di kabupaten Bondowoso, berdasarkan penelusuran dan analisa peneliti belum mencerminkan indikator yang operasional, realistik dan

measurabel. Hal ini bisa dibuktikan dari belum jelasnya indikator keberhasilan dari kegiatan pendampingan, kegiatan optimasi lahan, dan kegiatan percepatan tanam. Ketidakjelasan indikator keberhasilan sebuah program tentu akan berimplikasi pada sulitnya menetapkan dan menganalisis sejauhmana keberhasilan program bisa dicapai. Begitu juga ketika menjaustifikasi keberhasilan sebuah program, akan sangat bias dan menimbulkan resistensi dari masyarakat sebagai akibat dari kekeliruan data yang diambil melalui instrumen evaluasi yang tidak realistik dan operasional.

2. Indikator kegiatan hanya berorientasi pada sasaran fisik, dan mengabaikan aspek sosial budaya, seperti yang telah diurai di atas bahwa kegiatan UPSUS Pajale sedari awal masih mencari bentuk yang tepat dan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan. Tuntutan program yang hanya berorientasi pada realisasi yang bersifat fisik akan sangat berbahaya bagi kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas pembangunan pertanian. Berbagai temuan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketergantungan petani terhadap bantuan dari pemerintah, miskinnya kreatifitas petani dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi, merupakan sebagian kecil contoh dari salahnya pendekatan orientasi pembangunan yang hanya mementingkan aspek fisik saja. Aktivitas pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek penyadaran secara sosio kultural cenderung bersifat temporal, miskin partisipasi dan tidak berkelanjutan. Hal ini dikarenakan ada keterpisahan antara program pembangunan yang diinisiasi dengan realitas masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Begitu juga yang terjadi dengan program UPSUS pajale, dimana target yang dikejar hanya produksi, luas tanam, luas panen, serapan gabah oleh bulog, jumlah alsin yang terdistribusi, dll. Semua target yang ditetapkan belum difikirkan bagaimana

aspek sosiokultural yang ada, kearifan lokal yang dimiliki, keberlanjutan secara lingkungan dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat lokal. Padahal masyarakat petani adalah sebuah entitas yang bukan hanya alat produksi saja, yang tugasnya hanya memproduksi sebuah komoditas tanpa memikirkan bagaimana kelangsungan dan keuntungan bagi kehidupan mereka dimasa depan. Lantas kalo demikian adanya, siapa yang paling diuntungkan dari setiap curahan keringat petani?.

Konflik Sosial dan Resistensi Petani Sebagai Bentuk Implikasi dari Program yang Diskriminatif

Adanya resistensi atau perlawanan dari masyarakat terkait sebuah program, bisa dimaknai sebagai sebuah akumulasi dari kebuntuan komunikasi antara masyarakat dengan penguasa (Antlöv & Yuwono, 2002). Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari abainya pemerintah terhadap aspirasi yang dibawa oleh masyarakat. Pada konteks kegiatan UPSUS Pajale, keterabaian aspirasi masyarakat sangat nampak pada proporsi keterlibatan masyarakat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program UPSUS pajale ini. Seperti sudah diurai di atas, bahwa munculnya paket-paket bantuan yang digelontorkan pemerintah, belum benar-benar berdasarkan atas kebutuhan sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu sangat wajar jika masyarakat secara umum terkesan acuh bahkan kurang berpartisipasi dalam program ini. Fakta lain yang berhasil ditemukan adalah banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan kurang padunya kordinasi lintas elit lokal, yang pada akhirnya menyebabkan gesekan-gesekan kecil dalam pemanfaatan bantuan. Kondisi ini tercermin dari mulai bermunculannya bibit – bibit prasangka tentang siapa yang paling menikmati fasilitas bantuan yang diberikan pemerintah.

Dalam wacana antropologi atau sosiologi, konflik terjadi karena adanya persaingan yang dilanjutkan dengan pertentangan dua pihak atau lebih. Bila masih

dalam tataran persaingan, konflik yang bersifat manifes belum terlihat (Fisher, dkk., 2001). Adalah ironi dalam kehidupan masyarakat bahwa sesuatu yang begitu fundamental untuk eksistensinya dalam pola hidup kerjasama, harus mengandung didalamnya benih-benih konflik. Meskipun demikian, betul adanya bahwa semua lapisan sosial (kelas, kelompok ataupun golongan) yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi yang penting itu tidak hanya memperlancar kerjasama para anggota kelompok, tetapi lapisan sosial itu juga dapat menciptakan kondisi yang dapat menyebabkan pecahnya masyarakat atau konflik. Sikap kelompok yang menyebut kelompok saya adalah kelompok yang paling berhak mendapatkan program atau kelompok saya adalah kelompok yang paling berhak menjadi pelaksana program adalah benih-benih awal yang dapat menciptakan konflik.

Sebenarnya konflik terjadi bukan hanya karena kehadiran sesuatu yang baru (faktor inovasi, invensi dan lain-lain) dan disikapi dengan cara pro dan kontra, akan tetapi konflik juga dapat terjadi karena kondisi sosial tertentu yang sudah terlalu lama membelenggu masyarakat (Soekanto & Taneko, 1990). Dalam konteks ini, dugaan munculnya konflik yang dimaksud adalah konflik yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan program upsus pajale oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Konflik yang terjadi bisa antara kelompok pelaksana pendamping program dan kelompok sasaran penerima program, antara kelompok elite desa dengan kelompok yang terpingirkan, antar individu-individu dalam satu kelompok dan masih banyak lagi konflik-konflik antar kelompok jenis lainnya.

Dugaan lain, konflik yang terjadi pada masyarakat ini bukan semata-mata faktor kehadiran program upsus, akan tetapi konflik yang bersifat laten yang diakibatkan posisi, kepentingan dan kebutuhan yang harus terpenuhi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Program upsus hanyalah salah satu bagian yang

menjadi pemicu melahirkan konflik yang bersifat manifes.

Dapat disimpulkan, bahwa konflik dapat terjadi bila ada dua kelompok atau lebih yang salah satunya berposisi sebagai oposisi terhadap kelompok yang lain. Dalam pengertian yang lebih sempit konflik dapat pula terjadi pada antar anggota kelompok dalam satu kelompok yang diakibatkan oleh posisi, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda.

Konflik Sosial dan Implementasi Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Dalam pandangan peneliti, sedari awal tersamar kesalahan implementasi program UPSUS Padi jagung dan kedelai, bila mana kriteria sasaran seharusnya diikuti secara ketat. Imbas dari semua ini dapat diprediksikan akan memunculkan konflik antar masyarakat karena selain kesiapan dari masyarakat penerima program yang masih rendah, juga disebabkan pola kegiatan yang tidak memperhatikan keberadaan struktur sosial dan lembaga lokal pada masyarakat tersebut. Struktur sosial yang didalamnya menggambarkan kedudukan dan peran kelompok dan fungsi lembaga lokal yang telah lama menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat tiba-tiba harus berbenturan dengan lembaga baru yang belum tentu memiliki manfaat yang lebih baik.

Kondisi tersebut, bertambah rumit dengan masuknya kalangan elite desa yang saling bertentangan dalam sikap menyambut program UPSUS Pajale. Elite desa yang kebetulan menjadi bagian dari kegiatan UPSUS sudah barang tentu akan menyambut kegiatan ini dengan baik, sementara elite desa yang tidak terlibat secara langsung dalam program ini selalu curiga.

Konflik antar elite dalam menyikapi program UPSUS dan kesadaran masyarakat yang diwakili oleh kelompok generasi muda dengan cara menyikapi program secara positif sesuai dengan manual yang telah ditetapkan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten sebagaimana

yang telah dijelaskan tersebut diatas, adalah cermin dari asumsi dasar teori konflik yang menyebutkan semakin kelompok bawahan disatukan oleh keyakinan umum dan semakin terbangun struktur kepentingan kelompok mereka, maka semakin kelompok penguasa dan kelompok penakluk dalam satu sistem akan bertentangan. Terbangunnya struktur kepentingan kelompok diwakili oleh sikap generasi muda, sedang kelompok penguasa dan kelompok penakluk dalam satu sistem yang bertentangnya dalam hal ini tercermin dari sikap pertentangan penerimaan program UPSUS Pajale antara perangkat desa dengan tokoh informal.

Apa yang telah diungkapkan oleh modin (perangkat desa yang mengurus bidang kesejahteraan) adalah cermin sikap dari elite desa. Tidak jarang, sikap tersebut yang menjadi pemicu munculnya konflik bila batas-batas toleransi mulai dilanggar.

Menarik untuk diamati, dalam desain kelembagaan Program UPSUS walaupun tidak banyak melibatkan keberadaan lembaga formal desa, namun individu-individu dari lembaga desa tersebut masih dominan memegang peran dalam kelembagaan. Kondisi ini adalah gambaran yang mengindikasikan teori struktural fungsional Radcliffe Brown, dimana kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan struktur yang ada masih sangat kuat dan cara yang digunakannya pun cukup bervariasi dan halus (Soekanto & Taneko, 1990). Persoalan inilah yang diduga oleh kelompok generasi muda, dalam pelaksanaan kegiatan UPSUS pasti akan muncul penyelewengan-penyelewengan, karena kontrol dari masyarakat menjadi lemah sebagai akibat dari pelaksana program ada ditangan para perangkat desa dan elit kelompok lainnya. Pola pikir kelompok generasi muda seringkali berbenturan dengan struktur sosial masyarakat desa yang masih berpandangan, bahwa adanya perangkat desa yang mereka anggap sebagai kelompok sosial dalam struktur sosial tinggi tetaplah fungsional.

Ada beberapa asumsi dasar tentang teori konflik Karl Marx yang dapat

dibuktikan pada implementasi Program UPSUS di Kab. Bondowoso. Selain yang sudah dijelaskan tersebut diatas, asumsi yang menyebutkan: semakin tidak seimbang distribusi sumberdaya langka dalam sebuah sistem, maka semakin besar akan terjadinya konflik kepentingan antara penguasa dan bawahan dalam sebuah sistem (Sumodiningrat, 1999).

Aktor-aktor yang berkonflik di atas mempunyai kepentingan masing-masing terkait sumberdaya yang diperebutkan. Mekanisme para pihak yang terlibat mengklaim dalam memperoleh, mengontrol dan memelihara aliran keuntungan dari sumberdaya dan distribusinya merupakan suatu kemampuan akses yang dipengaruhi teknologi, modal, pasar, pengetahuan, wewenang, identitas sosial, dan relasi sosial. (Mustapit, 2011). Terkadang konflik tidak hanya terjadi antara atasan (elite desa dan elit lokal) dan bawahan (kelompok generasi muda, masyarakat awam dan kelompok perempuan serta kelompok miskin) tetapi seringkali justru konflik berkebutuhan pada antar kelompok atasan. Perebutan sumberdaya langka yang terbatas adalah salah satu pemicunya. Bahkan (Antlöv & Yuwono, 2002) tidak jarang konflik merambah pada konteks non materi, seperti pada keinginan mereka untuk terlibat sebagai pengurus, perebutan status, dan gengsi sosial atau *prestise*.

Hasil implementasi program UPSUS setidaknya mampu mengembangkan pola usaha tani melalui bantuan alat mesin dan bantuan saprodi, meningkatkan produksi, dan meningkatkan efisiensi usaha tani pada mereka yang menjadi sasaran program UPSUS. Disamping itu juga mampu mendorong proses terjadinya perubahan kultural, merubah masyarakat menjadi lebih kapitalistik.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait keberhasilan program UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Bondowoso, memang tidak sepenuhnya gagal dan keliru. Pada beberapa aspek memang ada keberhasilannya. Yang menjadi permasalahan adalah indikator keberhasilannya yang harus

kita cermati ulang. Jika indikator program UPSUS ini dilihat hanya dari jumlah bantuan alat dan mesin pertanian yang didistribusikan, maka program UPSUS pajale ini sudah berhasil menyalurkan dan memberikan ribuan alat mesin pertanian kepada ratusan kelompok tani di Kabupaten Bondowoso. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah alat mesin pertanian itu merupakan kebutuhan petani? Apakah petani bisa memanfaatkan alat dan mesin pertanian tersebut? Apakah petani mampu merasakan manfaat kehadiran bantuan itu secara adil dan merata?. Sayangnya banyak sekali bantuan dari program UPSUS Pajale yang diberikan belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan petani, keterampilan operator alat dan mesin pertanian belum dimiliki oleh petani, minimnya pengetahuan akan tatacara perawatan dan pemeliharaan, bahkan kehadiran alat dan mesin pertanian cenderung mendorong terjadinya konflik kepentingan diantara anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Jika demikian adanya, maka hakekat pembangunan melalui program UPSUS pajale belum berhasil menciptakan harmonisasi sosial, keadilan sosial, dan perbaikan martabat masyarakat.

Sebagai catatan akhir pada sub bab ini, bahwa asumsi dasar teori konflik tentang semakin hebat atau keras terjadinya konflik (Fisher et al., 2001), semakin besar terjadinya perubahan struktur dalam sebuah sistem dan pendistribusian kembali sumber daya langka belum teridentifikasi. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan budaya karena adanya rasa *sungkan, ewoh pakewoh*, atau perasaan tidak pantas bila menjadikan Program UPSUS sebagai sumber konflik yang bersifat manifes. Budaya patriarki setidaknya juga mendukung kondisi ini, karena dalam paham ini bukan hanya sekedar dominasi laki-laki terhadap perempuan, namun juga mencerminkan budaya senioritas. Senioritas dimaksud, cenderung menunjuk pada struktur sosial masyarakat yang tinggi perlunya dihormati.

SIMPULAN

Implementasi program UPSUS Pajale bisa direfleksikan dalam tiga tahap yang meliputi tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan. Temuan lapangan pada Tiga tahap implementasi UPSUS Pajale memberikan gambaran bahwa pada kalangan elit, telah memberikan dampak yang cukup baik dan respon yang positif terhadap implementasi program UPSUS, namun belum menyentuh masyarakat marginal dan masyarakat *powerless* ditingkat struktur terbawah. Implementasi program UPSUS setidaknya mampu mengembangkan pola usaha tani melalui bantuan alat mesin dan bantuan saprodi, meningkatkan produksi, dan meningkatkan efisiensi usaha tani, namun dampak itu hanya terjadi pada elit kelompok dan petani yang secara finansial sudah tergolong petani maju. Disamping itu juga mampu mendorong proses terjadinya perubahan kultural, merubah masyarakat menjadi lebih kapitalistik. Namun dampak implementasi program UPSUS Pajale berbanding terbalik bagi masyarakat marginal dan buruh tani di sekitar lokasi penerima bantuan program UPSUS Pajale. Bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi sebagai dampak implementasi dari program UPSUS adalah terjadinya perlawanan dari kaum buruh tani yang lahan nafkahnya telah hilang digantikan peran mesin traktor, combine harvester dan transpanter; terjadinya disharmonisasi sosial antara sesama anggota kelompok yang menerima bantuan dengan mereka yang tidak menerima bantuan; munculnya sikap apatis, proyek minded, timbulnya rasa saling curiga yang semuanya itu bermuara pada terjadinya konflik sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., & Yuwono, P. S. H. (2002). *Negara dalam desa: patronase kepemimpinan lokal*. Boston: Lappera Pustaka Utama.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*.
- Findiastuti, W., Wignjosoebroto, S., & Dewi, D. S. Analisa Human Error dalam Kasus Kecelakaan di Persilangan Kereta Api. http://personal.its.ac.id/files/pub/2834-m_sritomo-ie-Makalah%20Ergonomi%20Human%20Errors.pdf. Diakses tanggal 06 Agustus 2015.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2001). Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak. *The British Council, Jakarta, Indonesia*.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1985). Penemuan Teori Grounded: Beberapa Strategi Penelitian Kualitatif. Abd. Syukur Ibrahim dan Machrus Syamsuddin, penerjemah.
- Moleong, L. J. (1999). Metodologi penelitian. *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*.
- Mustapit, M. (2011). Kontestasi, Konflik Dan Mekanisme Akses Atas Sumber Daya Agraria (Studi Kasus Reklamasi Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi Rakyat di Kabupaten Jember). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5(1), 54–64.
- Ritzer, G., & Alimandan. (1985). *Sociologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda*. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, S., & Taneko, B. S. (1990). Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. *Jakarta: Rajawali, T. Th*.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Dasar-dasar penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 10(3), 146–159.